

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan. Bank berperan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit yaitu dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapatkan pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Menurut Ratna Bintari dkk.,(2013) Manfaat kredit bagi bank utamanya yaitu: **“untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit, terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah, hal ini penting untuk kelangsungan hidup bank”**<sup>1</sup>. Jika membahas tentang kredit maka termasuk membahas unsur-unsur yang terdapat di dalamnya yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa.

Akan tetapi pemberian kredit sangat berisiko besar kepada perusahaan bank karena tidak semuanya kredit yang disalurkan dalam keadaan lancar dimana sering terjadi kredit bermasalah atau adanya rentang waktu pengembalian kredit menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung oleh bank terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman

dari debitur. Kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak

---

<sup>1</sup>Ratna Bintari,dkk., **Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Kredit (Studi Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo, Pacitan): Ilmu Administrasi**,Jawa Timur, 2013, hal.1

sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, maka bank juga perlu melakukan pengawasan terhadap pemberian kredit yang disalurkan oleh bank tersebut. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan adanya suatu sistem yang memadai sebagai salah satu upaya yang diperlukan dan sangat berperan penting dalam menilai kelayakan di dalam pemberian kredit di suatu bank.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Eka Winda Yuliana dan Hesti Widiyanti (2014) yaitu Fungsi-fungsi yang terkait dalam pemberian kredit pada Unit Simpan Pinjam KUD Karya Mina Kota Tegal sudah cukup baik karena setiap fungsi selalu bekerja sama dengan baik. Selanjutnya Yenni Vera Fibriyanti dan Oktavia Ikke Wijaya (2018) hasil penelitiannya yaitu Prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Daerah Lamongan kepada debiturnya sangat efektif dengan presentase sebesar 89,86% karena telah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Bank PD. BPR Bank Daerah Lamongan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hadion Wijoyo (2020) Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada PT. Indomitra Mandiri yaitu: bahwa pihak bank telah melaksanakan survey sebelum memberikan kredit kepada debitur (*Character*) tetapi tidak memandang latar belakang pendidikan calon debiturnya (*Capacity*).

Julita Sugianto dan Erni Yanti Natalia (2019) Menjelaskan dalam setiap kegiatan kredit sangat diperlukan manajemen kredit yang baik. Suatu cara yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan adalah melaksanakan penagihan piutang kepada konsumen yaitu **“Menginformasikan konsumen yang tertagih bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk melunaskan piutang kepada pihak penagih”**<sup>2</sup>. Piutang menimbulkan tindakan penagihan dari pihak pemberi kredit terhadap pihak penerima kredit. Memaksimalkan pembayaran dan meminimalkan kerugian piutang yang tidak tertagih merupakan tujuan dari penagihan.

---

<sup>2</sup>Julita Sugianto dan Erni Yanti Natalia, **Analisis Prosedur Pemberian Kredit dan Penagihan Piutang Dalam Meminimalkan Piutang Tidak Tertagih Pada PT Aneka Tata Niaga** :Universitas Putera Batam, Batam, 2019, hal. 2

Apabila kredit telah diberikan oleh pihak pemberi kredit maka diperlukan upaya untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan syarat penjualan dalam waktu yang telah disepakati. Penagihan hendaknya dilaksanakan oleh bagian yang ditunjuk untuk melakukan penagihan piutang terhadap penerima kredit yang disebut kolektor. Menurut Taroreh, Warongan, & Runtu, (2016) dalam Julita Sugianto dan Erni Yanti Natalia (2019) terdapat beberapa cara penagihan piutang yaitu: **“Penagihan piutang dapat ditagih melalui surat, melalui telepon, kunjungan personal dan tindakan hukum”**<sup>3</sup>.

Berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 terdapat 3 macam lembaga keuangan bank yaitu: Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.

Bank Perkreditan Rakyat NBP 10 Doloksanggul bergerak dalam usaha perbankan, melayani Tabungan, Deposito, dan Kredit. Bank ini meningkatkan peranannya dalam menyalurkan pinjaman atau kredit terhadap nasabah. Adapun prosedur pemberian kredit diterapkan untuk mengarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan suatu usaha. Setiap tahapan proses pemberian kredit harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Kebijakan pokok pemberian kredit meliputi pokok-pokok pengaturan tata cara pemberian kredit yang sehat. Semakin meningkatnya penyaluran kredit, biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit yang diberikan. Dalam pemberian kredit atau pinjaman, BPR memiliki kelebihan dibanding bank umum lainnya

---

<sup>3</sup>Julita Sugianto dan Erni Yanti Natalia, **Op. Cit.**, hal.2

seperti : Jenis jaminan yang dipersyaratkan tidak sulit, Mengutamakan unsur kepercayaan dengan nasabah, Memiliki sistem pemasaran yang baik karena fokus terhadap UMKM.

Adapun data mengenai jumlah pemberian kredit, dan persentase kredit yang bermasalah (NPL) pada PT. BPR NBP 10 Doloksanggul periode tahun 2018 dan 2019, tertera pada Tabel 1.1.

**Tabel 1. 1**

**Jumlah Pemberian Kredit PT. BPR NBP 10 Doloksanggul**

**Tahun 2018 dan 2019**

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Persentase</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>	<b>Persentase</b>
Kredit Lancar	14.540.190.039	91%	15.257.282.100	86.39%
Dalam Perhatian Khusus	1.100.251.120	6.96%	1.443.454.400	8.17%
Kredit Kurang Lancar	122.488.700	0.77%	278.666.200	1.59%
Kredit Diragukan	89.125.100	0.55%	198.528.300	1.12%
Kredit Macet	114.849.900	0.72%	482.648.300	2.73%
<b>Total Kredit</b>	<b>15.996.904.859</b>	<b>100%</b>	<b>17.660.579.300</b>	<b>100%</b>
<b>Persentase Total NPL</b>		<b>2,04%</b>		<b>5,44%</b>

**Sumber:** PT. BPR NBP 10 Doloksanggul.

Dari data pada Tabel 1.1. dapat diketahui jumlah pemberian kredit yang diberikan PT. BPR NBP 10 Doloksanggul kepada nasabah, serta persentase kredit bermasalah (NPL) yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan per tahun untuk periode tahun 2018 dan 2019. Sedangkan pada periode tahun 2020 dan 2021 melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), negara memberikan kelonggaran/relaksasi kredit kepada debitur yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari wabah virus Corona yang sedang terjadi saat ini. Terkait dengan pernyataan tersebut, OJK menyampaikan informasi bahwa pernyataan tersebut didukung dengan keluarnya Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Contercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus*

*Disease*. Peraturan tersebut mulai berlaku sejak 13 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021, sehingga pemberian kredit dan penagihan piutang pada PT BPR NBP 10 Doloksanggul tidak efektif. Pada Tabel 1.1 dapat diketahui jumlah pemberian kredit kepada masyarakat tahun 2018 sebesar Rp. 15.996.904.859 dan pada tahun 2019 total pemberian kredit naik menjadi sebesar Rp. 17.650.579.300. Dari total pemberian kredit tersebut terdapat pengembalian kredit yang dilakukan nasabah BPR NBP 10 yaitu kredit lancar pada tahun 2018 sebesar Rp. 14.540.190.039 dan terdapat jumlah kredit macet sebesar Rp. 114.849.900. Kemudian pada tahun 2019 jumlah kredit lancar sebesar Rp. 15.257.282.100 dan terdapat jumlah kredit macet sebesar Rp. 482.648.300. Pada tahun 2018-2019 total pemberian kredit terjadi peningkatan tetapi juga mengakibatkan total kredit macet (*Non Performing Loan = NPL*) mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 tingkat persentase NPL sebesar 2,04% dan pada tahun 2019 menjadi 5,44%. Menurut Bank Indonesia (BI) rasio NPL yang ideal berkisar di sebesar 5%, sementara pada tahun 2019 NPL pada PT. BPR NBP 10 Doloksanggul mencapai 5,44% atau melebihi batas maksimal NPL yang telah ditentukan BI. NPL merupakan kredit dengan kualitas kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. NPL juga mengacu pada kondisi dimana debitur tidak dapat membayar kewajibannya terhadap bank yaitu kewajiban dalam membayar angsuran yang sudah dijanjikan di awal.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahasnya dalam tulisan skripsi yang berjudul; **ANALISIS SISTEM PEMBERIAN KREDIT DAN PENAGIHAN PIUTANG PADA PT. BPR NBP 10 DOLOKSANGGUL.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fenomena yang dihadapi perusahaan, maka masalah yang akan dibahas adalah : **Bagaimana sistem pemberian kredit dan penagihan piutang pada PT. BPR NBP 10 Doloksanggul ?**

## 1.3 Tujuan Penelitian.

Agar penelitian ini terarah maka tujuan dari penelitian perlu ditetapkan dan apa yang akan dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : **Untuk mengetahui sistem pemberian kredit dan penagihan piutang pada PT. BPR NBP 10 Doloksanggul.** Dengan demikian dapat dibuat kesimpulan bagaimana cara untuk mengurangi persentasi kredit yang macet atau NPL.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu :

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat agar lebih memahami bagaimana cara menganalisis data dan memecahkan masalah yang nyata melalui teori yang didapatkan.

Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai sistem pemberian kredit dan penagihan piutang pada PT.BPR NBP 10 Doloksanggul.

### 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan PT.BPR NBP 10 Doloksanggul untuk pengelolaan pemberian kredit dan penagihan piutang sehingga menghasilkan pengelolaan prosedur yang lebih baik.

### 3. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini, serta menjadi bahan masukan dalam mengatasi permasalahan yang sejenis.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian dan Elemen atau Unsur Dari Suatu Sistem

Suatu sistem terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan, yang saling bekerjasama untuk membentuk satu kesatuan. Menurut Mei Hotma Mariati Munthe sistem adalah **“sekumpulan unsur atau komponen dan prosedur yang harus berhubungan erat (*interrelated*) satu sama lain dan berfungsi secara bersama-sama agar tujuan yang sama (*cammon purpose*) dapat dicapai”**<sup>4</sup>. Sedangkan menurut Mulyadi sistem adalah **“suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”**<sup>5</sup>. Dalam suatu organisasi terdapat sistem kegiatan dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Tujuan akan dapat tercapai dengan efektif dan efisien apabila kegiatan sekelompok orang itu dilakukan dengan sistematis. Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian sistem. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang sama.

Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur yaitu dari subsistem yang lebih kecil, yang terdiri juga dari kelompok unsur yang membentuk subsistem tersebut. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Unsur-unsur sistem berhubungan erat satu dengan yang lainnya dan sifat serta kerja sama antar unsur sistem tersebut mempunyai bentuk tertentu. Unsur sistem bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem, dan suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.

---

<sup>4</sup>Mei Hotma Mariati Munthe, **Sistem Informasi Akuntansi**:Universitas HKBP Nommensen, Medan,2019 , hal.1

<sup>5</sup>Mulyadi, **Sistem Akuntansi**:Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2016 , hal. 4



## 2.2 Konsep Dasar Kredit

### 2.2.1 Pengertian Kredit

Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Maksudnya pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Hal tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah atau debitur adalah kepercayaan.

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau dengan angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Menurut Hamonangan Siallagan kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai :

**penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan<sup>6</sup>.**

Bank dapat memberikan kredit apabila dapat memiliki dana, atau tagihan yang sama dengan itu, bank terlibat kesepakatan dengan calon debitur baik volume, tingkat bunga, jangka waktu maupun agunan. Dengan ditandatangani perjanjian kredit berarti bank dan debitur telah terikat untuk melaksanakan. Bagi bank persetujuan kredit merupakan komitmen yang tidak bisa dibatalkan, begitu saja bagi debitur. Setelah kredit dikucurkan, bank selalu harus

---

<sup>6</sup> Hamonangan Siallagan, **Akuntansi Perbankan**: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2019 , hal. 87

memantau kualitas kredit. Semakin lama jangka waktu kredit umumnya semakin besar risikonya.

Pengertian umum kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau hak untuk menagih antara Kreditur dengan Debitur yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis mengenai jumlah kredit, jangka waktu, bunga dan jaminan kredit. Menurut Karmila Sari Sukarno dan Pujiyono kredit terdiri dari empat unsur yaitu “kepercayaan, tenggang waktu, *degree of risk*, dan prestasi atau obyek kredit.

**Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan pengertian yang telah disepakati”.**<sup>7</sup>

### 2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya apabila dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Atau dengan kata lain pengertian kata kredit jika berbicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terdapat didalamnya. Menurut Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswati unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu “Kepercayaan, Kesepakatan, Jangka Waktu, Resiko, Balas Jasa”<sup>8</sup>

#### 1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

#### 2. Kesepakatan

---

<sup>7</sup>Karmila Sari Sukarno dan Pujiyono, **Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan**: CV Indotama Solo, Surakarta, 2016, hal. 29

<sup>8</sup>Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswati, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**: CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hal. 64

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak bank dan nasabah.

### **3. Jangka Waktu**

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

### **4. Resiko**

Faktor resiko dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah yang tidak disengaja yaitu akibat musibah seperti bencana alam. Semakin panjang jangka waktu pengembalian suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan pihak bank baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

### **5. Balas Jasa**

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

#### **2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit Perbankan**

Karmila Sari Sukarno dan Pujiyono Menjelaskan tujuan kredit. Tujuannya adalah **“untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, dan**

**selalu meningkat”<sup>9</sup>**. Sedangkan kemampuan manusia mempunyai suatu batasan tertentu, memaksakan seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk pemenuhan hasrat dan cita-citanya guna peningkatan usaha dan peningkatan daya guna sesuatu barang/jasa. Fungsi kredit perbankan dalam perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut:

- a. Kredit meningkatkan daya guna uang
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang
- d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

### **2.3 Sistem Pemberian Kredit**

Penyaluran kredit merupakan salah satu usaha Bank yang mengandung risiko. Kredit yang disalurkan akan lebih berkualitas apabila risikonya dapat diantisipasi dan dikontrol dengan parameter-parameter yang ditetapkan. Kredit yang disalurkan akan lebih berkualitas apabila risikonya dapat diantisipasi dan dikontrol dengan parameter-parameter yang ditetapkan. Adapun parameter-parameter tersebut adalah sebagai berikut:

1. ***Risk Acceptance Criteria (RAC)***, RAC mencakup berbagai aspek antara lain aspek legal, manajemen, teknis dan pemasaran. Dengan penetapan RAC tersebut, Bank mengharapkan dapat memiliki portofolio yang terdiri atas nasabah berkualitas sesuai target market yang telah ditetapkan. RAC diatur dalam ketentuan manual produk atau apabila RAC tidak ditetapkan, maka penyaluran kredit tetap mengacu pada *Industry Acceptance Criteria (IAC)*.

---

<sup>9</sup>Karmila Sari Sukarno dan Pujiyono, **Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan**: CV Indotama Solo, Surakarta, 2016, hal.31.

2. ***Industry Acceptance Criteria (IAC)***, IAC merupakan kriteria-kriteria kualitatif sebagai bagian dari portofolio guideline dalam ekspansi kredit untuk:
  - a) Panduan bagi *Business Unit* dalam melakukan ekspansi kredit.
  - b) Memilih/menetapkan *targeted customer* pada masing-masing sektor/industri.
  - c) Merepresentasikan *risk appetite* bank pada sektor industri tertentu.
  
3. ***Financing Risk Rating(FRR)***, FRR atau penetapan tingkat risiko kredit merupakan kegiatan-kegiatan perumusan, pengukuran, dan penilaian dengan menggunakan metode kuantitatif atas risiko-risiko yang melekat/terdapat di dalam suatu obyek kredit yang diberikan kepada calon/nasabah dengan klasifikasi tingkat risiko.

Pemberian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 21 ayat 11 tentang perbankan dalam Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati adalah :

**penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga<sup>10</sup>.**

Keyakinan kreditur dalam meminjamkan dananya didasarkan atas beberapa kriteria yang antara lain mencakup:

- a) Keyakinan bahwa debitur akan bersedia mengangsur pinjamannya sesuai dengan komitmennya berdasarkan pengetahuan kreditur terhadap reputasi dan karakter dari debitur tersebut.
- b) Jaminan yang diserahkan kepada debitur kepada kreditur baik berupa asset atau deposito.
- c) Analisa kelayakan atas kondisi keuangan debitur atas kemampuannya untuk mengangsur pinjamannya. Analisa kelayakan tersebut berdasarkan informasi yang

disampaikan debitur kepada kreditur dengan asumsi bahwa informasi dan data yang

---

<sup>10</sup>Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati, **Op. Cit.**, hal. 62

disampaikan oleh debitur merupakan data yang sebenarnya, atau dengan kata lain calon debitur menyampaikan informasi dan data tersebut dengan jujur.

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa kreditur memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa debitur memiliki kemampuan serta itikad yang baik untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan komitmen dan kesepakatan antara kreditur dan debitur

Dalam penyaluran kredit harus mencakup prinsip-prinsip utama yang meliputi :

- a) Pemisahan pejabat kredit, pemisahan pejabat kredit tersebut berdasarkan bidang tugasnya, yaitu terdapat petugas yang memiliki tanggung jawab atas *credit relationship* dan kepastian akan pengembalian dari pinjaman tersebut. Dengan kata lain terdapat pejabat kredit di bidang *Relationship Management* (RM). Selain itu juga terdapat pejabat kredit yang bertugas untuk mengendalikan risiko kredit dan mengelola portofolio kredit yang biasa disebut pejabat kredit di bidang *Credit Risk Management* (CRM).
- b) Penerapan *four eyes principle*, yaitu dalam setiap proses penyaluran kredit dibutuhkan persetujuan oleh sekurang-kurangnya dua pejabat yang berwenang.
- c) Penerapan *risk scoring system*, yaitu setiap sektor bisnis harus terdapat standar penilaian skor risiko yang baku. Skor risiko yang baku tersebut memberikan dasar untuk perhitungan besarnya biaya risiko, besar pemberian pinjaman, dan merencanakan manajemen portofolio.
- d) Pemisahan pengelolaan kredit bermasalah (kategori kurang lancar, diragukan dan macet), yaitu kredit yang telah masuk dalam klasifikasi dan kategori kredit bermasalah, pengelolaannya harus dipindahkan dari jajaran pejabat kredit bidang *Relationship Management* (RM) kepada jajaran pejabat kredit di bidang *Credit Risk*

*Management* (CRM), atau dapat juga kepada pejabat kredit bidang RM yang ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah.

Dalam menyalurkan kredit kepada debitur, kreditur dalam hal ini bank harus memiliki keyakinan bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang telah disepakati bersama. Selanjutnya menurut Lee (1991) dalam Rika Suprpty dkk., “**terdapat aspek utama yang diperlukan bank bahwa debitur akan melunasi hutangnya, yang antara lain adalah: *Willingnes to pay* atau itikad debitur dan *capacityto pay* atau kemampuan membayar debitur**”<sup>11</sup>.

- a) ***Willingnes to pay* atau itikad debitur**, untuk membayar yang ditinjau dari aspek karakter, kewajiban moral dan kewajiban hukum.
- b) ***Capacity to pay* atau kemampuan membayar debitur**, kapasitas membayar debitur berdasarkan kekuatan dan kemampuan keuangannya, agunan yang diserahkan dan dukungan eksternal.

Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati Mengungkapkan “**ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, analisis 7 P dan studi kelayakan**”<sup>12</sup>.

Kedua prinsip ini 5 c dan 7 P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5 C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7 P dan didalam prinsip 7 P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5 C.

#### **a) Penilaian Kredit 5 C**

##### *a) Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat pribadi dan latar belakang pekerjaan.

<sup>11</sup>Rika Suprpty dkk., **Op.cit.**,hal43

<sup>12</sup>Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**:CV. Jakad MediaPublishing, Surabaya, 2020, hal. 69

*b) Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

*c) Capital*

Untuk melihat penggunaan modal, apakah cukup efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

*d) Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

*e) Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

**b) Penilaian Kredit 7 P**

*a) Personality*

yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

*b) Party*

yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

*c) Purpose*



yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

*d) Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

*e) Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

*f) Profitability*

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

*g) Protection*

Adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Menurut Rotman dkk., (2018) Dalam sistem pemberian kredit agar tidak terpusat hanya satu bagian, maka dibentuklah beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut akan saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh bank.

Adapun fungsi-fungsi yang terkait antara lain :

- a. Fungsi Sekretariat, fungsi ini bertanggungjawab dalam penerimaan permohonan kredit dan surat pemberitahuan.**
- b. Fungsi Penagihan, fungsi ini bertanggungjawab melakukan penagihan piutang langsung kepada debitur berdasarkan daftar piutang yang akan ditagih.**
- c. Fungsi Kas, fungsi ini bertanggungjawab atas penerimaan dan pengeluaran uang.**
- d. Fungsi Akuntansi, fungsi ini bertanggungjawab dalam penerimaan dan pengeluaran kas, serta menyelenggarakan laporan keuangan.**

**e. Fungsi Pemeriksaan Intern, fungsi ini bertanggungjawab untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi.<sup>13</sup>**

### **2.3.1 Prosedur Pemberian Kredit**

Menurut Mulyadi prosedur adalah “**suatu ukuran kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang**”<sup>14</sup>. Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahap-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan ke-aslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan.

Tahapan dalam memberikan kredit ini dikenal dengan nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum tidak jauh berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Perbedaan hanya terletak pada persyaratannya dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

#### **1) Pengajuan proposal**

---

<sup>13</sup>Rotman dkk., **Analisis Sistem Pemberian Kredit Pada PT. Bank Sulteng**: Universitas Muhammadiyah, Palu, 2018, hal. 1096

<sup>14</sup>Mulyadi, **Sistem Akuntansi**: Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2016, hal 4

- 2) Penyelidikan berkas pinjaman
- 3) Penilaian kelayakan kredit
- 4) Wawancara pertama
- 5) Peninjauan ke lokasi
- 6) Wawancara kedua
- 7) Keputusan kredit
- 8) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya
- 9) Realisasi kredit

Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit antara lain :

1. Prosedur permohonan kredit :
  - a. Pemohon menghubungi bank pelaksana.
  - b. Pemohon mengisi formulir permohonan kredit.
2. Prosedur verifikasi permohonan :
  - a. Permohonan kredit dimasukkan ke bagian kredit untuk verifikasi.
  - b. Diteliti oleh petugas analisis kredit.
  - c. Dimintakan persetujuan Kepala Bagian Kredit.
3. Prosedur pemberitahuan penolakan :
  - a. Petugas analisis kredit menilai bahwa permohonan kredit dianggap tidak layak.
  - b. Petugas mendatangi pemohon kredit untuk memberitahu alasan penolakan kredit. Pemberitahuan juga dapat dilakukan melalui surat.
  - c. Kredit yang ditolak dapat diproses kembali apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi.
4. Prosedur pemrosesan persetujuan
  - a. Bagian administrasi mengetik warkat kredit.

- b. Dimintakan verifikasi kepada staf administrasi kredit.
- c. Dimintakan otorisasi direksi dan Kabag. Marketing.
- d. Nasabah menyerahkan syarat-syarat kelengkapan kredit.
- e. Nasabah menandatangani perjanjian kredit dan dokumen pendukungnya.

#### 5. Prosedur pencairan kredit

- a. Syarat-syarat kelengkapan kredit diteliti kebenarannya oleh bagian administrasi.
- b. Bagian administrasi menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada kasir.
- c. Bagian kasir membuat kwitansi dan mengeluarkan uang.
- d. Nasabah menandatangani kwitansi pinjaman, menerima uang dan dokumen-dokumen yang diserahkan.

### 2.3.2 Metode Analisis Pemberian Kredit

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelola kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai dengan kepada pengendalian kredit yang macet. Menurut Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati Manajemen Kredit adalah bagaimana **“cara mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas”**<sup>15</sup>. Agar pengelolaan kredit dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya maka kita terlebih dahulu harus mengenal segala sesuatu

---

<sup>15</sup>Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**:CV. Jakad MediaPublishing, Surabaya, 2020, hal.63.

yang berhubungan dengan kredit. Perbedaan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan lain dengan kredit yang diberikan oleh bank terletak pada bidang pengelolaan kreditnya.

Menurut (Nawangarsi & Putra, 2016) dalam tulisan Julita Sugianto dan Erni Yanti Natalia (2019) bahwa penggolongan kredit sebagai berikut :

1. **Kredit Lancar, yaitu bilamana tidak ada penundaan pembayaran angsuran pokok atau bunga.**
2. **Kredit Dalam Perhatian Khusus, yaitu bilamana terdapat penundaan pelunasan angsuran pokok dan atau bunga 1-60 hari.**
3. **Kredit Kurang Lancar, yaitu bilamana terdapat penundaan pelunasan angsuran pokok dan atau bunga 60-90 hari.**
4. **Kredit Diragukan, yaitu bilamana terdapat penundaan pelunasan angsuran pokok dan atau bunga 90-120 hari.**
5. **Kredit Macet, yaitu bilamana terdapat penundaan pelunasan lebih dari 120 hari. Macet yaitu memperlambat pelunasan dan tidak membayar pokok atau bunga angsuran<sup>16</sup>.**

Pengelolaan risiko kredit untuk berbagai segmen kredit, mulai dari segmen korporasi sampai konsumen dan mikro sebenarnya sama, hanya berbeda dalam penekanan. Sebagai contoh, untuk segmen korporasi, analisis kredit lebih ditekankan apabila dibandingkan dengan sistem rating atau scoring. Sedangkan pada kredit ritel dan mikro, justru sistem rating atau scoring lebih berperan dalam menentukan keputusan kredit. Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Menjelaskan ruang lingkup pengelolaan risiko kredit meliputi;

**Analisis kredit (kuantitatif dan kualitatif), penerapan sistem *rating* dan *scoring* untuk membedakan kualitas kredit, melaksanakan proses monitoring kualitas portofolio kredit untuk kredit yang sudah menjadi bagian dalam buku bank, mengelola portofolio kredit agar dapat mengendalikan dari risiko konsentrasi, mengelola kredit bermasalah dan melakukan proses *stress testing* untuk portofolio kredit, untuk memastikan portofolio dalam keadaan yang terkendali pada saat terjadi krisis.<sup>17</sup>**

Bank perlu menerapkan suatu sistem yang konsisten mengenai jenis kualitas kredit yang bersedia diterima sesuai kebijakan bank. Pada analisis kredit tradisional, bank sangat mengandalkan pada kualitas analisis dan pengambil keputusan kredit secara judgment. Pada

<sup>16</sup>Julita Sugianto dan Erni Yanti Natalia , **Op. Cit.**, hal.10

<sup>17</sup>Ikatan Bankir Indonesia (IBI) , **Manajemen Risiko**: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hal.

sistem seperti ini, standar mengenai kualitas kredit dapat saja berbeda antara satu analis dengan analis yang lain sehingga satu aplikasi kredit dapat saja ditolak di satu cabang atau unit kerja, namun disetujui pada cabang lain atau anak perusahaan bank. Agar bank mempunyai satu standar kualitas kredit yang dapat diterima maka bank memerlukan metode penilaian kualitas kredit yang lain, yaitu sistem rating dan scoring. Dengan sistem ini maka pada semua cabang dan unit kerja, bank akan sama dalam memandang tingkat kualitas kredit.

### **2.3.3 Pengawasan Kredit**

Pengawasan kredit merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengamanan fasilitas kredit yang telah atau akan diberikan kepada nasabah. Pengawasan Kredit sangat penting sebab kredit merupakan kekayaan bank yang beresiko tinggi karena dikuasai oleh pihak luar bank.

Adapun tujuan dilakukannya pengawasan kredit adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghindari terjadinya penyelewengan baik dari intern maupun esktern bank.
2. Untuk memastikan kebenaran atau akurasi data perkreditan.
3. Untuk memajukan efesiensi pengelolaan perkreditan.
4. Untuk menilai tingkat kepatuhan kepada ketentuan kredit yang berlaku.

Pegawasan kredit berfungsi jika terjadi penyimpangan dari perjanjian antara pihak debitur dengan bank, maka pada tahap ini penyimpangan-penyimpangan tersebut diidentifikasi dan dicari tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Penyebab penyimpangan ini bisa dari pihak bank maupun dari pihak debitur. Penyebab dari pihak bank misalnya struktur organisasi yang lemah dari pihak bank, kurang akurat dalam melakukan penelitian sebelum memberikan kredit dan sebagainya. Dan dari pihak debitur biasanya penyebabnya adalah menurunnya kondisi keuangan. Setelah dilakukan

analisa terhadap penyebab penyimpangan tersebut, maka disusunlah suatu program untuk memperbaikinya. Dan dari pelaksanaan program itu nantinya akan dibandingkan dengan suatu standar yang baku dalam menentukan kolektibilitas kredit. Dalam tahap ini, kredit akan dikelompokkan dalam kelompok lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

## **2.4 Konsep Penagihan Piutang**

### **2.4.1 Pengertian dan Jenis Piutang**

Menurut James, et al, (2005:258) dalam Melanny Methasari piutang adalah **“jumlah uang yang dipinjam dari perusahaan oleh pelanggan yang telah membeli barang atau memakai jasa secara kredit”**<sup>18</sup>. Secara umum, piutang adalah sejumlah pinjaman yang terjadi karena penjualan barang atau jasa secara kredit, atau sejumlah pinjaman seseorang kepada orang lain yang dapat ditagih dalam jangka waktu tertentu. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang atau jasa yang dijual secara kredit. Menurut Melanny Methasari menjelaskan; **“piutang terjadi jika perusahaan memberi pinjaman uang kepada perusahaan, pihak lain atau melakukan suatu jasa, ataupun beberapa tipe transaksi lainnya yang menciptakan suatu hubungan antara pihak yang memberi pinjaman dengan pihak yang berhutang”**<sup>19</sup>

Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan, yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa atau pemberian kredit terhadap debitur, yang pada umumnya diberikan tempo 30 hingga 90 hari untuk pembayarannya. Intinya, dalam akuntansi, piutang digunakan untuk menjelaskan adanya tuntutan pada pihak luar perusahaan, yang diharapkan akan selesai dengan penerimaan sejumlah uang tunai.

---

<sup>18</sup>Melanny Methasari, **Op. Cit.**, hal 17.

<sup>19</sup>Melanny Methasari, **Loc. Cit**

Piutang diklasifikasikan sebagai lancar (jangka pendek) dan tidak lancar (jangka panjang). Piutang lancar (*current receivable*) diharapkan akan tertagih dalam satu tahun selama satu siklus operasi berjalan, mana yang lebih panjang. Semua piutang lain digolongkan sebagai piutang tidak lancar. Selanjutnya piutang diklasifikasikan dalam neraca sebagai piutang dagang dan piutang non dagang.

### **1. Piutang Dagang (*Trade Receivable*)**

Piutang dagang adalah jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang atau jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal. Piutang dagang di sub-klasifikasikan lagi menjadi piutang usaha dan wesel tagih.

#### *a) Piutang Usaha (*Account Receivable*)*

Piutang usaha adalah janji lisan dari pembeli untuk membayar barang atau jasa yang dijual. Piutang usaha biasanya dapat ditagih dalam 30 sampai 60 hari.

#### *b) Wesel Tagih (*Note Receivable*)*

Wesel tagih (*note receivable*) adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Wesel tagih dapat berasal dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Wesel tagih dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu:

- I. Wesel tagih berbunga (*interest bearing note*). Wesel tagih berbunga (*interest bearing note*) ditulis sebagai perjanjian untuk membayar pokok atau jumlah nominal dan ditambah dengan bunga yang terhutang pada tingkat khusus.
- II. Wesel tagih tanpa bunga (*non interest bearing note*). Pada wesel tagih tanpa bunga tidak dicantumkan persen bunga, tetapi jumlah nominalnya meliputi beban bunga. Jadi, nilai sekarang merupakan selisih antara jumlah nominal dan bunga yang dimasukkan dalam wesel tersebut yang kadang-kadang disebut bunga implisit atau bunga efektif.



## 2. Piutang Non Dagang (*Nontrade Receivable*)

Piutang non dagang (*Nontrade Receivable*) adalah tagihan-tagihan timbul dari transaksi selain penjualan barang atau jasa. Sejumlah contoh piutang non-dagang dari berbagai transaksi misalnya:

- a) Uang muka kepada karyawan staf
- b) Uang muka kepada anak perusahaan
- c) Piutang deviden dan bunga.

### 2.4.2 Prosedur Penagihan Piutang

Piutang menimbulkan tindakan penagihan dari pihak pemberi kredit terhadap pihak penerima kredit. Memaksimalkan pembayaran dan meminimalkan kerugian piutang yang tidak tertagih merupakan tujuan dari penagihan. Apabila kredit telah diberikan oleh pihak pemberi kredit maka diperlukan upaya untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan syarat penjualan dalam waktu yang telah disepakati. Julita Sugianto dan Erni Yanti Natalia (2019) Menjelaskan **“Penagihan hendaknya dilaksanakan oleh bagian yang ditunjuk untuk melakukan penagihan piutang terhadap penerima kredit yang disebut kolektor. Oleh karena itu perusahaan perlu menetapkan kebijaksanaan dan prosedur penagihan.”**<sup>20</sup>. Terdapat beberapa cara penagihan piutang antara lain: Melalui surat, Melalui telepon, Kunjungan personal, dan Tindakan-tindakan hukum lainnya. Pencatatan piutang dilakukan oleh petugas bagian jurnal, petugas bagian kartu piutang, dan buku besar. Buku-buku yang diperlukan terdiri atas buku jurnal penelitian, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, buku besar dan kartu piutang sebagai buku pembantu.

---

<sup>20</sup>Julita Sugianto dan Erni Yanti Natalia, **Analisis Prosedur Pemberian Kredit dan Penagihan Piutang Dalam Meminimalkan Piutang Tidak Tertagih Pada PT Aneka Tata Niaga**: Universitas Putera Batam, Batam, 2019, hal 17

Piutang adalah komponen yang berpengaruh dalam sebagian besar pendapatan perusahaan. Cara pengamanan dan strategi yang wajar terhadap piutang ialah penting tidak hanya untuk memelihara hubungan antara konsumen tetapi juga untuk keberhasilan perusahaan yang meliputi piutang kepada pegawai, wesel tagih, dan memantau piutang agar berjalan dengan lancar.

### **2.4.3 Dokumen dan Catatan Akuntansi Yang Digunakan**

Dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit dan penagihan piutangantara lain :

a. Formulir permohonan kredit.

Formulir ini berisi kesanggupan tertulis dari peminjam dan tanda tangan dari pengurus (Kasubsi Kredit) sebagai bukti penyerahan bahwa permohonan kredit sesuai dengan permintaan dan kondisi kerjanya.

b. Kwitansi

Kwitansi dibuat rangkap tiga oleh bendahara simpan pinjam sebagai bukti telah mengeluarkan uang.

c. Bukti pengeluaran kas

Dibuat sebagai bukti pengeluaran kas dari bank setelah pencairan kredit.

d. Bukti penerimaan kas

Sebagai bukti penerimaan kas dari debitur ketika membayar angsuran kredit.

e. Kartu pinjaman

Kartu pinjaman dibuat untuk mencatat angsuran pinjaman tiap bulan.

Catatan akuntansi adalah semua catatan yang berhubungan dengan semua transaksi akuntansi yang terjadi seperti jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan keuangan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian kredit dan penagihan piutang antara lain :

a. Jurnal Umum

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak lagi dapat ditagih.

b. Jurnal Pengeluaran Kas

Digunakan untuk mencatat pemberian kredit dan transaksi pengeluaran kas.

c. Jurnal Penerimaan Kas

Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari pengembalian kredit.

d. Kartu piutang untuk mencatat saldo piutang kepada setiap debitur

## 2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Pada tabel 2.1 disajikan keseluruhan jurnal penelitian terdahulu yang berguna untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Julita Sugianto dan Erni Yanti Natalia (2019)	Analisis Prosedur Pemberian Kredit dan Penagihan Piutang Dalam Meminimalkan Piutang Tidak Tertagih Pada PT Aneka Tata Niaga	Kualitatif Deskriptif	Prosedur pemberian kredit pada PT Aneka Tata Niaga diawali dengan mengisi formulir data pelanggan baru yang kemudian akan disetujui oleh manajer sales dan direktur. Penagihan piutang pada PT Aneka Tata Niaga dilakukan oleh bagian admin

				piutang dalam menyiapkan invoice dan kuitansi yang diperlukan dalam penagihan kepada pelanggan
2	Eka Winda Yuliana dan Hesti Widianti (2014)	Sistem Pemberian Kredit Pada Unit Simpan Pinjam KUD Karya Mina Kota Tegal	Kualitatif Deskriptif	Fungsi-fungsi yang terkait dalam pemberian kredit pada Unit Simpan Pinjam KUD Karya Mina Kota Tegal sudah cukup baik karena setiap fungsi selalu bekerja sama dengan baik dan masing- masing bagian mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
3	Rotman, Guasmin, dan Dicky Yusuf (2018)	Analisis Sistem Pemberian Kredit Pada PT. Bank Sulteng	Kualitatif Deskriptif	Analisis sistem pemberian kredit pada PT. Bank Sulteng menunjukkan bahwa prosedur dari pemberian kredit sesuai dengan prosedur perkreditan secara umum, hal ini dapat dibuktikan dengan saling terorganisirnya bagian-bagian yang terlibat dalam pengurusan permohonan kredit, sistem pemberian

				<p>kredit pada PT. Bank Sulteng sudah efektif dan terkontrol</p>
4	Ibrahim (2019)	<p>Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah Pada PT.BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Sistem Akuntansi Pemberian Kredit di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang sudah baik. Dikarenakan dalam Sistem Akuntansi pemberian kredit tersebut sudah terdapat prosedur mengenai; (a) penyusunan perencanaan perkreditan (b) proses putusan kredit (c) proses penyusunan perjanjian kredit (d) dokumentasi dan administrasi kredit (e) pengawasan dan pembinaan kredit (f) pelunasan kredit</p>
5	Hadion Wijoyo (2020)	<p>Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indomitra Mandiri</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada PT. Indomitra Mandiri yaitu: bahwa pihak bank telah melaksanakan survey sebelum memberikan kredit kepada debitur (<i>Character</i>). Bahwa bank</p>

				telah melakukan penilaian kelayakan calon debitur baik aspek kemampuan membayar dan tidak memandang latar belakang pendidikan calon debitur ( <i>Capacity</i> ).
6	Ratna Bintari, Mochammad Dzulkirom,dan Achmad Husaini (2013)	Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Kredit (Studi Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo Pacitan)	Kualitatif Deskriptif	Fungsi Internal Audit pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo belum tersedia, sehingga pemeriksaan secara independen belum dapat terlaksana
7	Yenni Vera Fibriyanti dan Oktavia Ikke Wijaya(2018)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan	Kualitatif Deskriptif	Prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Daerah Lamongan kepada debiturnya sangat efektif dengan presentase sebesar 89,86% karena telah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Bank PD. BPR Bank Daerah Lamongan.

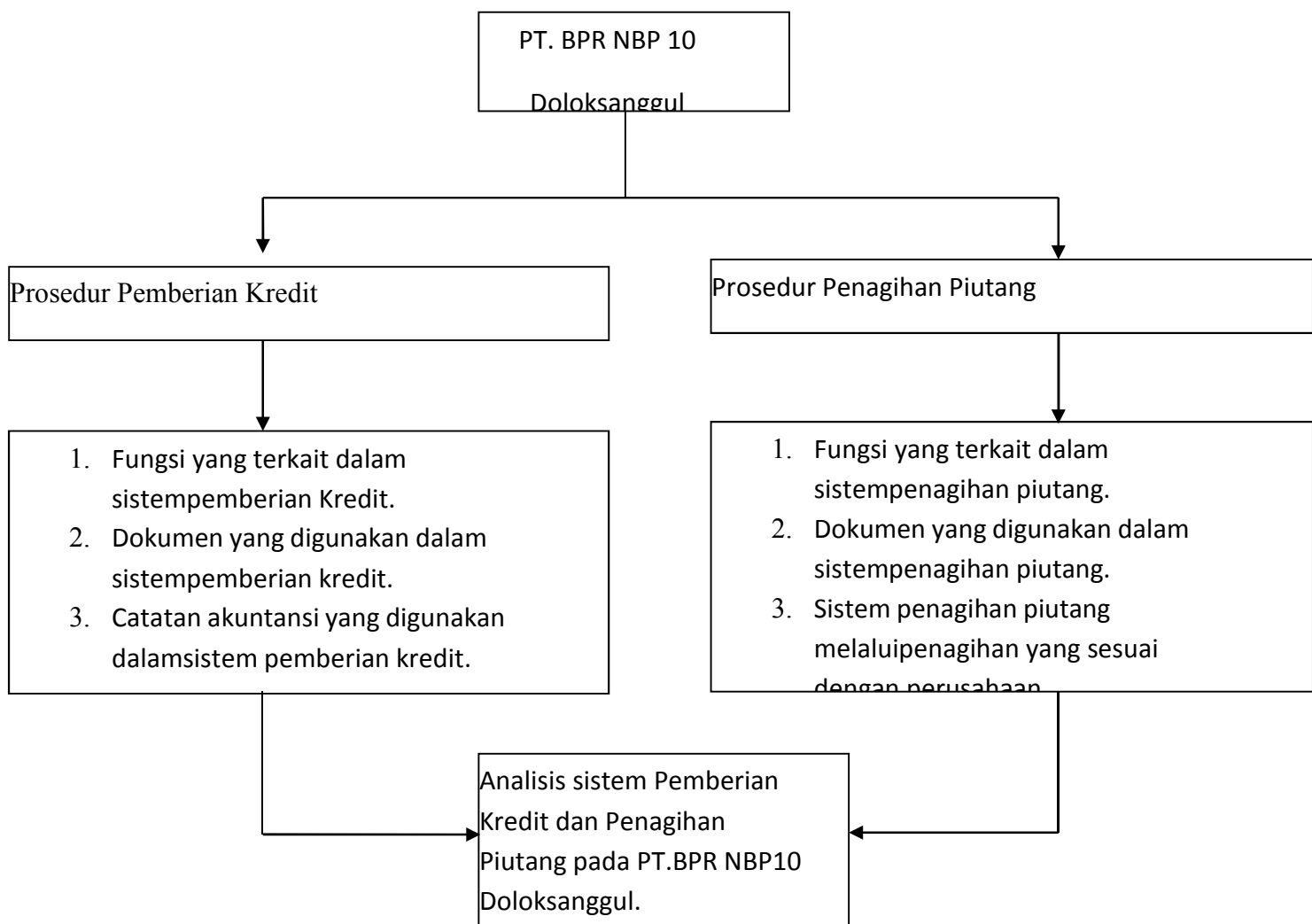
**Sumber:** Data yang diolah dari <https://scholar.google.com/>

Yang menjadi acuan penulis dari hasil penelitian terdahulu ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Julita Sugianto dan Erni Yanti Natalia (2019) dengan judul Analisis Prosedur Pemberian Kredit dan Penagihan Piutang Dalam Meminimalkan Piutang Tidak Tertagih Pada

PT Aneka Tata Niaga. Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu tersebut adalah objek penelitiannya dimana objek penelitian ini dilakukan pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

## 2.6 Kerangka Berpikir

Pada gambar 2.1 dijelaskan model kerangka berpikir akan teori yang digunakan peneliti yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Pada gambar 2.1 dijelaskan kerangka berpikir yang merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi : Fungsi yang terkait dalam sistem pemberian kredit dan penagihan piutang, Dokumen yang digunakan dan, Catatan akuntansi yang digunakan pada PT BPRNBP 10 Doloksanggul.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini bahwa objek penelitian yang ditetapkan mengenai Prosedur Pemberian Kredit, dan Penagihan Piutang pada PT. BPR NBP 10 Doloksanggul Jln. Melanthon Siregar No.49 Doloksanggul Kab Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Penulis memfokuskan pembahasan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan sistem pemberian kredit, dan penagihan piutang pada PT. BPR NBP 10 Doloksanggul, khususnya mengenai :

1. Tahap-tahap pemberian kredit.
2. Dokumen yang digunakan.
3. Mekanisme penagihan piutang.
4. Catatan akuntansi yang digunakan.
5. Unit organisasi atau fungsi yang terkait.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif merupakan :

**metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mementingkan makna dari pada generalisasi<sup>21</sup>.**

---

<sup>21</sup>Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , dan R & D**:Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 222.

Peneliti kualitatif ingin mendeskripsikan atau memberikan suatu fenomena apa adanya atau menggambarkan simbol atau tanda yang ditelitinya sesuai dengan yang sesungguhnya dan dalam konteksnya. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti tidak boleh memengaruhi situasi dan interaksi sosial antara peneliti dan subjek/informan yang diteliti maupun di antara subjek yang diteliti sekalipun. Interaksi di antara individu yang diteliti hendaklah terjadi sebagaimana yang sesungguhnya dalam konteksnya, bukan rekayasa peneliti.

### **3.3 Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada bagian akuntansi PT BPR NBP 10 Doloksanggul. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari sumber pendukung yaitu data prosedur pemberian kredit dan penagihan piutang.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengadakan penelitian langsung ke PT. BPR NBP 10 Doloksanggul. Metode yang digunakan yaitu:

#### **a) Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data.

Supaya setiap pewawancara mempunyai keterampilan yang sarna, maka diperlukan training kepada calon pewawancara. Adapun daftar pertanyaan yang diajukan kepada bagian pembukuan, mengenai pemberian kredit,, dan penagihan piutang tertera pada lampiran.

### **b) Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dan informasi dari buku-buku, jurnal, internet dan sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan terhadap apa yang ada dilapangan. Dokumen yang dikumpulkan yaitu; Surat Permohonan Pemberitahuan Kredit, Surat Perjanjian Kredit, Sejarah Singkat Perusahaan, Struktur Organisasi, Data pemberian kredit serta NPL, metode dan dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit serta penagihan piutang periode tahun 2018 sampai dengan 2019.

### **3.5 Metode Analisa Data**

Pengolahan data hasil penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Metode deskriptif dilakukan dengan analisis menggunakan pendekatan teori berdasarkan fakta yang ada untuk dianalisis berdasarkan pengertian-pengertian yang dapat diartikan sebagai kesimpulan. Metode analisis data diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai prosedur pemberian kredit dan penagihan piutang pada PT.BPR NBP 10 Doloksanggul.

Berikut tahap-tahap dalam teknik analisis data penelitian metode deskripif:

#### **1. Mengumpulkan Data**

Mengumpulkan data yang telah didapat dilapangan melalui pengumpulan data yang telah ditentukan peneliti.

#### **2. Reduksi Data**

Setelah mendapatkan hasil output dari metode pengumpulan data tersebut, peneliti mereduksi data-data tersebut. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### 3. Analisis data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan mempelajari segenap aktivitas pada PT.BPR NBP 10 Doloksanggul, tetapi dalam hal ini adalah tentang prosedur pemberian kredit dan penagihan piutang serta analisis pemberian kredit dengan analisis 5C apakah sudah sesuai dengan prosedur pemberian kredit dan apakah sudah sesuai dengan prosedur penagihan. Serta apakah pihak bank telah melakukan analisis pemberian kredit dengan prinsip 5C.

### 4. Penyajian Data

Semua data yang telah dikumpulkan dan didapat oleh peneliti di lapangan akan sulit dalam melihat gambaran dan menarik kesimpulannya, penyajian data untuk mempermudah pemahaman gambaran data, peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk narasi dari data-data yang telah direduksi dan diperoleh sebelumnya.

### 5. Membuat Kesimpulan

Dari langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dimulai dengan pengumpulan dan di lapangan, mereduksi data dengan memilih hal yang pokok dan memfokuskan gambaran mengenai data-data yang didapat, maka tahap akhir teknis analisis data penelitian ini yaitu mengambil kesimpulan dari semua data yang diperoleh oleh peneliti.

